

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUPERVISI PENDIDIKAN DI MADRASAH
IBTIDAIYAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIAMIS**

Mia Helmia¹

STIA YPPT Priatim TSM¹
Jalan Perintis Kemerdekaan No.200 Tsm
miahelmia1984@gmail.com

Abstract: The implementation of learning supervision policies often faces various challenges, limited resources, lack of supervisor competence, and weak teacher participation. This results in less than optimal education quality. The implementation of effective supervision policies is expected to encourage teachers to continue to develop their competence, thereby realizing quality learning. This study uses a qualitative approach and descriptive methods at MI Ciamis Regency. This study produces: as key factors determining the success of the implementation of learning supervision policies in improving the quality of education, including: effective, consistent and continuous implementation design, effective communication in the implementation of learning supervision policies; the support and commitment of leaders in the implementation of learning supervision policies; increasing capacity and resources as the main key to achieving the effectiveness of the implementation of learning supervision policies and realizing improvements in the quality of education; participation and involvement of stakeholders in the implementation of learning supervision policies in improving the quality of education; and evaluation of the implementation of learning supervision policies in improving the quality of education is needed..

Keywords: Implementation of Supervision Policy and Education Quality.

Abstrak: Implementasi kebijakan supervisi pembelajaran sering kali menghadapi berbagai tantangan, keterbatasan sumber daya, kurangnya kompetensi pengawas, dan lemahnya partisipasi guru. Sehingga mengakibatkan mutu pendidikan kurang optimal. Implementasi kebijakan supervisi yang efektif diharapkan dapat mendorong guru untuk terus mengembangkan kompetensinya, sehingga mewujudkan pembelajaran bermutu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif pada MI Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menghasilkan: sebagai faktor kunci penentu keberhasilan implementasi kebijakan supervisi pembelajaran dalam peningkatan mutu pendidikan antara lain: perancangan implementasi yang efektif konsisten dan berkesinambungan, komunikasi efektif dalam implementasi kebijakan supervisi pembelajaran; adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam implementasi kebijakan supervisi pembelajaran; peningkatan kapasitas dan sumber daya sebagai kunci utama tercapainya efektivitas implementasi kebijakan supervisi pembelajaran dan terwujudnya peningkatan mutu pendidikan; partisipasi dan keterlibatan stakeholder dalam implementasi kebijakan supervisi pembelajaran dalam peningkatan mutu pendidikan; dan dibutuhkan evaluasi implementasi kebijakan supervisi pembelajaran dalam peningkatan mutu pendidikan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Supervisi dan Mutu Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi suatu bangsa. Kualitas pendidikan yang baik menjadi kunci dalam mencetak generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di era global. Dalam konteks pendidikan Islam, Madrasah Ibtidaiyah (MI) memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter peserta didik sejak usia dini. Kualitas pendidikan, khususnya pada tingkat pendidikan dasar, menjadi penentu bagi kemajuan sumber daya manusia. Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang beriman dan bertakwa serta memiliki kompetensi yang mumpuni.

Untuk mencapai mutu pendidikan yang optimal, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui implementasi kebijakan supervisi pembelajaran. Supervisi pembelajaran merupakan suatu proses pemberian bantuan profesional kepada guru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ciamis sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan agama Islam memiliki peran strategis dalam mendorong implementasi kebijakan supervisi pembelajaran di MI.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di MI, namun masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya kualitas pembelajaran, kurangnya kompetensi guru, dan kurang efektifnya pelaksanaan supervisi pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan supervisi pembelajaran oleh Kantor Kemenag Kabupaten Ciamis belum berjalan secara optimal.

Berikut beberapa data temuan implementasi kebijakan supervisi pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Kemenag Kabupaten Ciamis sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.
Data Temuan Berkenaan Dengan Implementasi Kebijakan Supervisi Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Kemenag Kabupaten Ciamis

Aspek Penelitian	Temuan Data
Mutu Pendidikan di MI	<ul style="list-style-type: none"> a. Nilai Ujian Nasional (UN) MI di Kabupaten Ciamis masih tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. b. Hasil belajar siswa MI masih belum mencapai target yang ditetapkan. c. Proses pembelajaran di MI masih belum optimal.
Kurangnya Supervisi di MI	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah pengawas madrasah di Kabupaten Ciamis masih belum memadai. b. Kompetensi pengawas madrasah di Kabupaten Ciamis masih perlu ditingkatkan.
Belum Adanya Model Supervisi Pembelajaran yang Tepat untuk MI	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan supervisi pembelajaran di MI masih belum memadai. b. Model supervisi pembelajaran yang diterapkan di MI saat ini masih bersifat tradisional dan kurang efektif. c. Belum ada model supervisi pembelajaran yang dikembangkan secara khusus untuk MI. d. Model supervisi pembelajaran yang diterapkan di MI belum memperhatikan karakteristik dan kebutuhan MI.

Sumber: Kasi Penmad Kemenag Kab. Ciamis Tahun 2024.

Dengan demikian, implementasi supervisi pembelajaran di MI di Kabupaten Ciamis masih belum optimal dan belum mampu meningkatkan mutu pendidikan di MI. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kurangnya jumlah pengawas madrasah, rendahnya kompetensi pengawas madrasah, kurangnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan supervisi pembelajaran, dan belum adanya model supervisi pembelajaran yang tepat untuk MI. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas supervisi pembelajaran di MI, antara lain: menambah jumlah pengawas madrasah, meningkatkan kompetensi pengawas madrasah, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan supervisi pembelajaran, mengembangkan model supervisi pembelajaran yang tepat untuk MI. Dengan meningkatkan

efektivitas supervisi pembelajaran, diharapkan mutu pendidikan di MI di Kabupaten Ciamis dapat ditingkatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan supervisi pembelajaran oleh Kantor Kemenag Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI. Secara spesifik, penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, serta dampaknya terhadap peningkatan mutu pembelajaran di MI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan di MI dan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan.

METODE

Penelitian mengenai implementasi kebijakan supervisi pembelajaran oleh Kantor Kemenag Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif (Surakhmad, 2018:96). Desain penelitian ini dirancang mengikuti model interaktif dari Maxwell (Alwasilah, 2013:86), yang mempertimbangkan keselarasan keenam komponen berikut: (1) problem penelitian; (2) pertanyaan penelitian; (3) tujuan penelitian; (4) metode penelitian; (5) kerangka pemikiran dan (6) validitas penelitian. Sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang dibutuhkan adalah implementasi kebijakan supervisi pembelajaran oleh Kantor Kemenag Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan Data sekunder yang juga dipentingkan dalam penelitian ini adalah sejumlah kepustakaan dan dokumen-dokumen penting yang dapat memperjelas permasalahan dalam penelitian ini. Data kepustakaan berasal dari buku-buku yang menjelaskan tentang konsep pendahuluan yang membutuhkan beberapa referensi, seperti:

- 1) Data-data tentang rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Ciamis, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan pengawas madrasah.
- 2) Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis, demografis.
- 3) Data-data lainnya yang diperoleh dari Kantor Kemenag Kabupaten Ciamis, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan pengawas madrasah.

Alat pengumpul datanya meliputi: wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan dan analisisnya datanya dengan cara: Reduksi data, Penyajian data dan Kesimpulan dan verifikasi. Sedangkan penggunaan triangulasi dilaksanakan dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga penelitian kualitatif dapat memperoleh kevalidan data yang lebih baik, keakuratan, dan ketepatan interpretasi. Kombinasi tiga metode ini memberikan sudut pandang yang berbeda dan saling melengkapi, sehingga memperkuat temuan penelitian dan meningkatkan kepercayaan pada hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dengan dengan mengacu pada rumusan masalah, maka hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa desain kebijakan supervisi pembelajaran yang diterapkan oleh Kemenag Kabupaten Ciamis secara umum sudah cukup jelas dan kuat. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan terbatasnya anggaran. Meskipun demikian, kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di MI, terutama dalam hal peningkatan kompetensi guru.
2. Komunikasi yang efektif merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan apapun, termasuk kebijakan supervisi pembelajaran. Dengan komunikasi yang baik, semua pihak dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu dalam upaya

- implementasi kebijakan supervisi pembelajaran oleh Kemenag Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI
3. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dukungan administratif dan komitmen moral pimpinan di Kemenag Kabupaten Ciamis sangat krusial dalam implementasi kebijakan supervisi pembelajaran di MI. Adanya dukungan berupa anggaran dan fasilitas yang memadai serta kepemimpinan yang inspiratif dapat mendorong guru untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan supervisi. Namun, masih terdapat kendala terkait kurangnya pemahaman guru mengenai konsep supervisi yang efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.
 4. Berdasarkan hasil penelitian, kapasitas pengawas di Kabupaten Ciamis masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kompetensi teknis dalam bidang pembelajaran. Selain itu, ketersediaan sumber daya seperti sarana prasarana dan anggaran juga menjadi kendala dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran secara efektif. Meskipun demikian, kebijakan supervisi pembelajaran yang dicanangkan oleh Kemenag Kabupaten Ciamis telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pembelajaran di beberapa madrasah. Hal ini terlihat dari peningkatan rata-rata nilai siswa pada beberapa mata pelajaran.
 5. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi guru dalam kegiatan supervisi pembelajaran di MI Kabupaten Ciamis masih rendah. Faktor-faktor yang menghambat antara lain beban kerja yang tinggi dan kurangnya pemahaman tentang manfaat supervisi. Namun, terdapat peningkatan partisipasi setelah dilakukan pelatihan bagi guru. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan supervisi yang melibatkan guru secara aktif dapat meningkatkan kemampuan pedagogik guru dan berdampak positif pada prestasi belajar siswa.
 6. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa implikasi kebijakan yang mungkin diajukan adalah:
 - a. Penguatan kapasitas pengawas: Meningkatkan kompetensi dan keterampilan pengawas melalui pelatihan yang berkelanjutan.
 - b. Peningkatan partisipasi guru: Melibatkan guru secara aktif dalam proses supervisi dan memberikan insentif yang memadai.
 - c. Penyediaan sumber daya yang cukup: Memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan supervisi, seperti anggaran, sarana, dan prasarana.
 - d. Pengembangan sistem M&E yang lebih baik: Menyusun sistem M&E yang lebih komprehensif dan berbasis data untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi efektivitas kebijakan.
 - e. Kolaborasi dengan berbagai pihak: Membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga pendidikan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat, untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di MI.

B. Pembahasan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Implementasi kebijakan memerlukan berbagai kegiatan operasional yang rinci, melekat, dan terintegrasi dalam kehidupan administrasi sehari-hari, sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang bersifat kompleks sekaligus kritis, oleh karena itu diperlukan kesadaran dan pemahaman terhadap kompleksitas implementasi kebijakan sehingga dapat dirumuskan dan dilaksanakan upaya sistematis dan terencana.

Implementasi kebijakan adalah serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier adalah proses di mana kebijakan yang telah ditetapkan diubah menjadi program dan tindakan konkret di lapangan. Mereka menggambarkan implementasi sebagai tahap kritis di mana kebijakan yang telah dirumuskan di tingkat perencanaan diterjemahkan menjadi prosedur, program, dan tindakan yang dilaksanakan di tingkat operasional. (Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, 1983). Steiss dan Danekee menerangkan bahwa dalam analisis implementasi kebijakan, analisis kebijakan perlu fokus pada dua pokok: *Degree of consensus* di antara aktor pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan; *magnitude of change* dari alternatif kebijakan yang dipilih (Sugito, 1890).

Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. *“policy implementation encompasses those by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.”* Definisi tersebut memberikan makna bahwa Tindakan-tindakan yang mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. (Pramono, 2020)

Riant Nugroho (2014: 260), menegaskan praktek implementasi kebijakan adalah merupakan kegiatan manajemen implementasi kebijakan yakni: Implementasi strategi, pengorganisasian, penggerakan dan kepemimpinan, dan pengendalian.

Berdasarkan aspek-aspek yang diteliti dengan didukung oleh teori dan hasil penelitian, maka pembahasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berbagai ahli pendidikan dan teori terkait supervisi pembelajaran dapat menjadi rujukan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan ini. Beberapa di antaranya adalah:
 - a. Teori Belajar: Teori belajar seperti konstruktivisme, kognitivisme, dan humanisme dapat memberikan dasar tentang bagaimana proses pembelajaran terjadi dan bagaimana supervisi dapat mendukungnya.
 - b. Teori Kepemimpinan: Teori kepemimpinan transformasional dapat menjadi inspirasi bagi kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang mampu memotivasi dan mengembangkan guru.
 - c. Model-model Supervisi: Ada berbagai model supervisi yang dapat dipilih, seperti model klinis, model kolaboratif, atau model pengembangan profesional.

Dengan desain kebijakan supervisi pembelajaran yang jelas dan kuat, serta implementasi yang efektif, diharapkan dapat terjadi peningkatan mutu pendidikan di MI, yang ditandai dengan:

- a. Peningkatan kualitas pembelajaran: Kegiatan pembelajaran menjadi lebih aktif, menarik, dan berpusat pada siswa.
- b. Peningkatan kompetensi guru: Guru memiliki kompetensi pedagogik, profesional, dan sosial yang lebih baik.
- c. Peningkatan hasil belajar siswa: Rata-rata nilai siswa meningkat dan siswa lebih aktif dan kreatif.
- d. Peningkatan kepuasan stakeholders: Orang tua, siswa, dan masyarakat puas dengan kualitas pendidikan di MI.

Desain kebijakan supervisi pembelajaran yang jelas dan kuat merupakan langkah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI. Dengan melibatkan berbagai pihak, memanfaatkan teori yang relevan, dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan, kebijakan ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Ciamis.

2. Kemenag Kabupaten Ciamis, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di MI, tentu telah memiliki kebijakan supervisi pembelajaran yang komprehensif. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Namun, seberapa efektif kebijakan tersebut? Salah satu faktor penentunya adalah seberapa baik komunikasi dalam implementasinya.
 - a. Pemahaman yang sama: Komunikasi yang efektif memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, sasaran, dan mekanisme supervisi pembelajaran. Hal ini akan menghindari kesalahpahaman dan konflik yang dapat menghambat proses peningkatan mutu.
 - b. Motivasi: Komunikasi yang positif dan konstruktif dapat memotivasi guru untuk terus mengembangkan kompetensinya. Pujian, umpan balik yang membangun, dan dukungan dari pengawas akan mendorong guru untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan tugasnya.

- c. Solusi Masalah: Masalah yang muncul dalam proses pembelajaran dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara efektif melalui komunikasi yang terbuka dan jujur. Pengawas dan guru dapat bekerja sama mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- d. Kolaborasi: Komunikasi yang baik memfasilitasi kolaborasi antara pengawas, guru, dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi ini akan menghasilkan sinergi yang positif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pendapat Ahli dan Teori yang Relevan yaitu:

- a. Teori Komunikasi: Berbagai teori komunikasi, seperti teori komunikasi interpersonal, teori komunikasi organisasi, dan teori komunikasi persuasif, dapat memberikan kerangka kerja yang berguna dalam memahami proses komunikasi dalam konteks supervisi pembelajaran.
 - b. Studi Empiris: Hasil penelitian sebelumnya mengenai efektivitas supervisi pembelajaran dapat memberikan bukti empiris tentang pentingnya komunikasi efektif dalam proses tersebut.
 - c. Pendapat Ahli Pendidikan: Para ahli pendidikan, khususnya yang memiliki keahlian dalam bidang supervisi, dapat memberikan pandangan yang berharga tentang praktik-praktik terbaik dalam komunikasi supervisi.
3. Banyak ahli pendidikan yang menekankan pentingnya peran kepemimpinan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Sergiovanni (1995), menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan budaya sekolah yang positif dan mendukung pembelajaran. Untuk menganalisis dukungan dan komitmen pimpinan Kemenag Kabupaten Ciamis dalam implementasi kebijakan supervisi pembelajaran di MI, perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap beberapa aspek berikut:
1. Visi dan misi: Sejauh mana pimpinan Kemenag memiliki visi yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan di MI dan bagaimana supervisi pembelajaran dapat berkontribusi dalam mencapai visi tersebut.
 2. Kebijakan dan program: Apakah pimpinan Kemenag telah merumuskan kebijakan dan program yang mendukung implementasi supervisi pembelajaran, seperti pelatihan bagi pengawas, penyediaan sarana dan prasarana, serta mekanisme evaluasi.
 3. Alokasi sumber daya: Apakah pimpinan Kemenag telah mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mendukung pelaksanaan supervisi pembelajaran, baik dalam bentuk anggaran maupun tenaga.
 4. Komunikasi dan koordinasi: Sejauh mana pimpinan Kemenag mampu membangun komunikasi yang efektif dengan para pengawas, kepala madrasah, dan guru serta melakukan koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam proses supervisi.
 5. Motivasi dan dukungan: Apakah pimpinan Kemenag mampu memberikan motivasi dan dukungan kepada para pengawas dan kepala madrasah dalam melaksanakan tugas supervisi.

Dukungan dan komitmen pimpinan Kemenag Kabupaten Ciamis sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan supervisi pembelajaran di MI. Kepemimpinan yang transformasional dan berorientasi pada hasil sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan mutu pendidikan.

4. Implementasi kebijakan supervisi pembelajaran oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ciamis Madrasah Ibtidaiyah (MI) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada ketersediaan kapasitas dan sumber daya yang memadai.

Kapasitas dalam konteks ini merujuk pada kemampuan individu atau organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi supervisi. Sedangkan sumber daya meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan supervisi, seperti tenaga ahli, anggaran, sarana prasarana, dan teknologi informasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan supervisi pembelajaran di Kabupaten Ciamis masih menghadapi beberapa kendala terkait dengan kapasitas dan sumber

daya. Kapasitas guru dan pengawas dalam melaksanakan supervisi pembelajaran masih perlu ditingkatkan. Selain itu, sumber daya yang tersedia, seperti waktu, dana, dan sarana prasarana, masih belum memadai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan mutu pendidikan MI di Kabupaten Ciamis melalui supervisi pembelajaran membutuhkan penguatan kapasitas dan sumber daya yang memadai. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pelatihan guru dan pengawas, penyediaan dana dan sarana prasarana yang memadai, serta pengembangan budaya kolaboratif di sekolah.

5. Partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik, termasuk kebijakan supervisi pembelajaran. Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kabupaten Ciamis, peran aktif dari berbagai pihak sangatlah penting. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai konsep partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan, teori yang relevan, serta praktiknya dalam implementasi kebijakan supervisi pembelajaran oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ciamis.

Partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dapat didefinisikan sebagai proses melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu kebijakan atau program, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pemangku kepentingan dalam konteks pendidikan meliputi guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

Suparman (2010) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan supervisi pembelajaran adalah kurangnya dukungan dari kepala madrasah, keterbatasan waktu dan sumber daya, dan hubungan yang tidak kolaboratif antara supervisor dan guru.

6. Supervisi pembelajaran merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ciamis, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan Islam, tentu memiliki kebijakan terkait supervisi pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah (MI). Untuk memastikan efektivitas kebijakan tersebut, diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan supervisi pembelajaran di MI Kabupaten Ciamis sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan mengacu pada teori-teori yang relevan dan pendapat para ahli, serta melakukan kajian yang mendalam, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang implementasi kebijakan tersebut dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Model implementasi kebijakan terdiri dari dua pendekatan, yaitu model bersifat *top-down* dan *bottom up*. Pendekatan yang bersifat *top-down* digunakan untuk mengklasifikasikan para peneliti yang menggunakan logika berfikir dari atas tindakan lebih lanjut pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Model *top-down* ialah berupa pola yang dikerjakan oleh Pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya model *bottom-up* mengadopsi logika berfikir dari bawah ke atas dan menegaskan pentingnya dua aspek penting dalam implementasi kebijakan, yakni struktur kekuasaan birokrat pada tingkat bawah (*street level bureaucrat*) dan kelompok sasaran kebijakan. Model *bottom-up* berarti meski kebijakan digagas oleh Pemerintah, namun pelaksanaan oleh masyarakat sipil (Hertati, 2020).

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu: Teori George C. Edward Edward III (Subarsono, 2005) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dan sebagainya. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Teori Merilee S. Grindle mengemukakan bahwa Keberhasilan implementasi ini dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan mencakup: seberapa kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Supervisi pembelajaran merupakan suatu proses pemberian bantuan profesional kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam rangka meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara efektif dan efisien. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa pengertian supervisi pembelajaran menurut literatur bahasa Inggris yaitu Sergiovanni & Starratt (2007:3) bahwa: *Supervision is a process that is designed to help teachers improve their instruction and, ultimately, student learning. It is a collaborative process that involves the supervisor and the teacher working together to identify areas for improvement, develop and implement strategies for improvement, and evaluate the effectiveness of those strategies* (Supervisi adalah proses yang dirancang untuk membantu guru meningkatkan pengajaran mereka dan, pada akhirnya, pembelajaran siswa. Ini adalah proses kolaboratif yang melibatkan supervisor dan guru yang bekerja sama untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk perbaikan, dan mengevaluasi efektivitas strategi tersebut).

Demikian juga, Glatthorn (2004:4) menjelaskan mengenai supervisi pendidikan yaitu: *Supervision is a process that helps teachers improve their teaching and, ultimately, student learning. It is a collaborative, job-embedded, and data-driven process that is focused on improving teacher practice and student achievement* (Supervisi adalah proses yang membantu guru meningkatkan pengajaran mereka dan, pada akhirnya, pembelajaran siswa. Ini adalah proses kolaboratif, tertanam dalam pekerjaan, dan didorong oleh data yang berfokus pada peningkatan praktik guru dan prestasi siswa).

Dengan uraian yang berbeda, Hoy & Miskel (2008:245) menjelaskan tentang supervisi pembelajaran sebagai berikut: *Supervision is the process of helping teachers improve their instruction and, ultimately, student learning. It is a systematic process that involves the supervisor working with teachers to identify areas for improvement, develop and implement strategies for improvement, and evaluate the effectiveness of those strategies* (Supervisi adalah proses membantu guru meningkatkan pengajaran mereka dan, pada akhirnya, pembelajaran siswa. Ini adalah proses sistematis yang melibatkan supervisor yang bekerja dengan guru untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk perbaikan, dan mengevaluasi efektivitas strategi tersebut).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa supervisi pembelajaran adalah proses kolaboratif, tertanam dalam pekerjaan, dan didorong oleh data yang berfokus pada peningkatan praktik guru dan prestasi siswa. Tujuannya adalah untuk membantu guru meningkatkan pengajaran mereka dan, pada akhirnya, meningkatkan pembelajaran siswa.

Secara sederhana, kualitas pendidikan dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu sistem pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, definisi ini terlalu umum dan perlu diperkaya dengan berbagai perspektif.

Beberapa ahli mendefinisikan kualitas pendidikan sebagai berikut: (1) Mutu: Tingkat baik buruknya sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia); (2) Kemampuan sistem pendidikan: Dalam mengelola dan memproses pendidikan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan menghasilkan output yang berkualitas; (3) Keadaan, kondisi, penampilan, atau kinerja: Yang ditunjukkan oleh setiap komponen satuan pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kualitas pendidikan memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan, antara lain; (4) Input: Meliputi sumber daya manusia (guru, siswa), kurikulum, sarana prasarana, dan anggaran; dan (5) Proses: Meliputi kegiatan pembelajaran, interaksi guru-siswa, dan pengelolaan kelas; (6) Output: Meliputi prestasi siswa, lulusan yang siap kerja, dan kontribusi terhadap masyarakat; (7) Outcome: Meliputi dampak jangka panjang dari pendidikan, seperti peningkatan kualitas hidup, kemajuan sosial, dan pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditetapkan simpulan sebagai berikut:

1. Desain implementasi kebijakan supervisi pembelajaran yang efektif oleh Kemenag Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI sudah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi kebijakan ini membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak terkait, termasuk Kemenag Kabupaten Ciamis, Kasi Penmad, kepala madrasah, pengawas madrasah, guru MI, dan orang tua siswa.
2. Penelitian terkait komunikasi efektif dalam implementasi kebijakan supervisi pembelajaran oleh Kantor Kemenag Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah menunjukkan beberapa poin penting yaitu: pentingnya Komunikasi yang Jelas dan Terbuka, penerapan Berbagai Saluran Komunikasi, pemberian Umpan Balik yang Konstruktif, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat.
3. Temuan penelitian mengenai Dukungan dan Komitmen Pimpinan (Kasi Penmad, Kepala MIN dan Kepala MIS) dalam implementasi kebijakan supervisi pembelajaran oleh Kantor Kemenag Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah antara lain: dukungan dan komitmen Kasi Penmad, Kepala MIN, dan Kepala MIS dalam implementasi kebijakan supervisi pembelajaran masih perlu ditingkatkan; faktor yang mempengaruhi dukungan dan komitmen pimpinan: pemahaman kebijakan, ketersediaan sumber daya, dan budaya organisasi; dan dukungan dan komitmen pimpinan berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah.
4. Peningkatan mutu pendidikan di madrasah ibtidaiyah melalui kebijakan supervisi pembelajaran oleh Kantor Kemenag Kabupaten Ciamis masih memerlukan perhatian dan upaya serius. Peningkatan kapasitas dan sumber daya menjadi kunci utama untuk mencapai efektivitas supervisi pembelajaran dan mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di madrasah ibtidaiyah.
5. Partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan supervisi pembelajaran oleh Kantor Kemenag Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI masih belum optimal. Hal ini perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan supervisi pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah.
6. Terdapat beberapa temuan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan supervisi pembelajaran oleh Kemenag Kabupaten Ciamis antara lain: perencanaan supervisi masih perlu diperkuat, pelaksanaan supervisi masih didominasi oleh pendekatan tradisional, tindak lanjut hasil supervisi belum optimal, dan kurangnya komunikasi dan kolaborasi antara pengawas dan guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, Chaedar. 2013. *Pokok Kualitatif, Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Pasolong, H. 2011. *Teori Administrasi Publik* (Cetakan Ke). Bandung: Alfabeta, cv.
- Pramono, J. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. In *Kebijakan Publik*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surakhmad, Winarno. 2018. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Sergiovanni, T. J. 1995. *Building community in schools*. London: Allyn & Bacon.
- Sergiovanni, T. J., & Starratt, R. J. 2007. *Supervision: A leadership perspective* (5th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Suparman, U. 2010. *Supervisi Pembelajaran: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Wahab, Solichin Abdul, 2000, *Analisis Kebijaksanaan (dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara)* Jakarta : Bumi Aksara
- Wahab, Abdul.,Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasinya*. Malang: Universitas Brawijaya.